MISKIN-HUKUM-BANTUAN

2025

PERDA No. 4, LD 2025/No. 4, 19 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

- RINGKASAN
ABSTRAK : Bahwa setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum, termasuk masyarakat miskin, selain daripada itu untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
- DASAR HUKUM : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2013; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; dan Permendagri No. 77 Tahun 2020;
- MATERI POKOK : Bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin pada prinsipnya mengatur mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Di dalamnya termasuk diatur mengenai tujuan, bentuk dan tata cara pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- CATATAN :
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan, 6 Mei 2025
 - Penjelasan: 5 hlm

Link JDih: <https://jdih-dprd.bojonegorokab.go.id/perda/28>